MEMORI KOLEKTIF KONFLIK DI ACEH DALAM NOVEL *KAWI MATIN DI NEGERI ANJING* KARYA ARAFAT NUR

Indra Dwi Wahyu*[1], Sukirno[2]

Program Studi Sastra Indonesia, Fakulas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta

***Correspondence email: indradwwa@gmail.com**

Abstract

This research aims to analyze the collective memory of the conflict in Aceh and the formation of collective memory in the novel Kawi Matin di Negeri Anjing by Arafat Nur. This research uses Maurice Halbwachs' collective memory theory approach. This study employs a descriptive qualitative research method, which aims to address the research focus by providing detailed descriptions of the data. The research results show a collective memory of the conflict events in Aceh in the novel. The novel shapes collective memory through the portrayal of characters, the impact of the social environment, and the reconstruction of history. The findings show that literary works, especially novels, function as a medium that can reflect and preserve collective memory. Novels not only describe an event but also serve as a tool to build a group's identity and collective memory.

Keywords*: *Aceh Conflict, Collective Memory, Literature

[1] Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Fakulas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta
[2] Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakulas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan wilayahnya. Dimulai dari kedatangan portugis, VOC hingga Belanda. Peperangan kolonial yang dimulai sejak 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914. Perang yang bersejarah tersebut membawa banyak korban jiwa pada kedua belah pihak, 35.000 orang tewas pada pihak Belanda dan 70.000 orang tewas pada pihak Aceh. Selanjutnya, pada tahun 1942 ketika Jepang mengambil alih kekuasaan Hindia-Belanda, pejuang-pejuang Aceh masih melakukan pertempuran di wilayah Aceh Besar masing-masing tanggal 23-24 Februari 1942 dan 11-12 Maret 1942 (Al-Chaidar, 1998: 20). Rentetan peristiwa tersebut menjadi catatan sejarah bahwa Aceh merupakan bangsa yang memiliki semangat juang tak pernah padam melawan penindasan dan kesewenangan.

Selain itu, Aceh juga memiliki semangat juang dan konsisten dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan Aceh pernah menolak ajakan untuk mendirikan negara sendiri sebagai hasil dari susah payah berjuang melawan penjajahan. Selanjutnya, Aceh juga pernah menolak tawaran untuk membentuk "Negara Federasi Sumatera" sebagai hak prerogatif bagi kelompok-kelompok masyarakat adat di Sumatera. Dalam sidang staf gubernur Aceh pada tanggal 20 Maret 1948, Aceh sepakat untuk tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Para pejuang Aceh juga turut serta dalam menyelamatkan Indonesia agar kemerdekaannya tidak terhapus, yaitu dalam respon PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Masyarakat Aceh juga memiliki kontribusi besar dalam pembangunan Republik Indonesia. Dalam situasi yang sedang susah, masyarakat Aceh bekerja sama untuk mengumpulkan dana dan perhiasan emas untuk memenuhi keinginan Presiden Soekarno dalam kunjungannya ke Banda Aceh pada tahun 1948. Upaya kolektif ini menghasilkan pembelian dua pesawat, yaitu RI 001 dan RI 002 Seulawah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal armada Garuda Indonesia (Al-Chaidar, 1998: 8-11).

Tidak hanya melawan penjajah, Aceh juga memiliki sejarah konflik terhadap negaranya sendiri. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh pada tahun 1953 menandai awal mula konflik di Aceh. Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat Jakarta untuk menggabungkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara merupakan pemicu dari gerakan ini. Sebagai konsekuensi dari penggabungan kedua provinsi tersebut, masyarakat Aceh kehilangan kesempatan untuk menjalankan syariat Islam dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Karena kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dianggap merugikan masyarakat Aceh, maka masyarakat Aceh menanggapinya dengan pemberontakan bersenjata. Lalu, setelah Aceh diberikan status khusus pada tahun 1959, yang mencakup otonomi yang cukup besar di bidang agama, budaya, dan pendidikan. Hal ini menandai berakhirnya gerakan Darul Islam yang telah berjuang untuk kemerdekaan sejak tahun 1959. Sebagai hasilnya, Aceh didirikan kembali sebagai provinsi sendiri dan mendapatkan kembali hak-hak istimewanya (Basyar, 2008: 95).

Kemudian konflik di Aceh muncul kembali dengan nama baru Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu ketika Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976, dengan tujuan untuk memisahkan diri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menganggap bahwa pemerintah Indonesia telah berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh, hal inilah yang merupakan alasan utama mengapa Aceh ingin melepaskan diri dari Indonesia. Rakyat Aceh tidak menikmati sumber daya alamnya sendiri, justru dieksploitasi oleh pemerintah Indonesia, dan mereka hanya menerima bagian dari penderitaan akibat ketidakadilan tersebut. Dalam upaya untuk mendorong ekspansi ekonomi selama periode tersebut, pemerintah

Orde Baru melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah Aceh. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Aceh menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak prihatin atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aceh (Mudjiharto, 2020: 91).

Hingga terjadilah Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), yang dimulai pada tahun 1989 dan berlangsung hingga tahun 1998. Pemerintah pusat menggunakan dalih pemulihan keamanan dari sisa-sisa Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Di sisi lain, masyarakat Aceh menyaksikan apa yang mereka anggap sebagai pembantaian terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah yang juga mengakibatkan ribuan korban jiwa. Karena dicurigai sebagai anggota GPK, banyak orang Aceh yang hilang diculik atau dibunuh. Mayat mereka diyakini dibuang ke sungai atau dikubur di perbukitan. Selama operasi militer berlangsung di Aceh, terlihat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat sipil Aceh menjadi sasaran berbagai bentuk penyiksaan, termasuk disetrum, ditelanjangi, diperkosa hingga melahirkan anak di luar nikah, dikubur hidup-hidup, digorok, ditembak di depan khalayak ramai, dan dikuburkan secara massal (Al-Chaidar, 1998).

Selain itu, konflik di Aceh menjadi semakin berlarut-larut sebagai akibat dari perbedaan perspektif yang mendasar antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemilik sah kedaulatan Aceh. Konflik di Aceh tidak dapat diselesaikan hanya dengan dialog politik GAM dengan pemerintah. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri pemberontakan yang terjadi di kalangan rakyat Aceh, yaitu melalui upaya operasi terpadu. Lagi-lagi, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kompromi satu sama lain. Pada tahun 2003, sebuah Keputusan Presiden dikeluarkan untuk memberlakukan darurat militer di Aceh.

Pada tahun 2004, bencana tsunami melanda di tengah-tengah konflik yang tak kunjung usai di Aceh itu, dan menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Selama tsunami, penyelesaian konflik Aceh mendapatkan momentumnya. Setelah tsunami, pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk tidak melanjutkan konflik. Baik pemerintah pusat maupun GAM menyimpulkan bahwa melanjutkan konflik dan menggunakan taktik militer dengan kekerasan akan merugikan kedua belah pihak.

Potret peristiwa tersebut didokumentasikan melalui berbagai media salah satunya karya sastra berupa novel yang berjudul *Kawi Matin di Negeri Anjing* (2020) karya Arafat Nur. Novel tersebut menggambarkan situasi keterpurukan masyarakat Aceh saat daerah Aceh diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) dan masa setelahnya. Realitas fiksi dalam novel tersebut begitu dekat dengan realitas faktual. Pulungan, (2023) menyebutkan bahwa Swingewood memandang sastra sebagai manifestasi langsung dari kehidupan nyata, yang meliputi hirarki sosial, dinamika keluarga, konflik kelas, dan aspek-aspek budaya, dengan sastra yang berfungsi sebagai penghubung imajinatif. Swingewood membagi tiga konsep pendekatan sosiologi sastranya, yaitu (1) sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, (2) kepengarangannya dan produksi, serta (3) sejarah dan karya sastra (Wahyudi, 2013).

Peristiwa dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* menggambarkan memori kolektif yang digagas oleh Maurice Halbwachs, salah seorang sosiolog Prancis yang pemikirannya dipengaruhi oleh sosiologi Durkheim dan filsafat individualistik Bergson. Ia menggabungkan kedua pemikiran Durkheim dan Bergson sebagai dasar bagi pemikirannya tentang memori kolektif. Halbwachs berpendapat bahwa memori kolektif merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan kelompok sosial dalam proses pembentukan dan pemeliharaan ingatan tentang masa lalu. Setiap individu mengingat peristiwa dalam kerangka sosialnya, seperti keluarga, teman, atau komunitas, yang mempengaruhi

cara mereka dalam menafsirkan dan mempertahankan ingatan-ingatan tersebut. Menurut Halbwachs, kelompok sosial berperan penting dalam menentukan apa yang diingat dan apa yang diabaikan melalui praktik-praktik sosial seperti ritual, perayaan, dan narasi historis. Proses inilah yang menghasilkan narasi kolektif yang sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan kelompok, menjadikannya sebagai alat penting untuk membentuk dan mempertahankan identitas kelompok (Halbwachs, 1992).

Setelah peneliti melakukan pembacaan kritis terhadap novel *Kawi Matin di Negeri Anjing,* peneliti mencoba menganalisis novel tersebut menggunakan teori memori kolektif Maurice Halbwachs. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ingatan kolektif peristiwa konflik di Aceh serta faktor pembentukan memori kolektif dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur.

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Zisykien (2019) Universitas Airlangga yang berjudul *Memori Kolektif Para Aktivis 1998 dalam Novel Bercerita Karya Leila S. Chudori.* Temuan dari penelitian ini meliputi memori kolektif yang diasosiasikan dengan sejumlah aktivis, memberikan penjelasan tentang memori yang diasosiasikan dengan semua peristiwa penting dan karakter sejumlah aktivis. Melalui penerapan teori representasi, makna memori kolektif para aktivis dalam hubungannya dengan masyarakat dan keindonesiaan dihubungkan dengan setiap tokoh yang ada di dalam novel. Memori kolektif tersebut terdiri dari, pendampingan yang dilakukan oleh para aktivis kepada para petani, melakukan demonstrasi, aksi tanam jagung. Pendampingan para aktivis kepada buruh. Para aktivis menjadi korban penculikan dari oknum pemerintah, demonstrasi dengan aksi payung hitam. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2021) Universitas Muhammadiyah Malang, dalam jurnal Jentera: Jurnal Kajian Sastra Vol. 10 No. 2 yang berjudul *Memori Kolektif dalam Novel Secangkir Teh Melati Karya Bunjamin Wibisono.* Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori memori kolektif Maurice Halbwachs dengan pendekatan sosiologi sastra. Dengan hasil penelitian tentang ingatan seorang tokoh dalam novel terhadap kekacauan pada peristiwa reformasi 1998 yaitu, memori kolektif peristiwa G30S dan memori kolektif tentang stereotip kaum komunis.

Beberapa penelitian di atas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran pustaka penulis, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti menemukan bahwa belum ditemukannya penelitian yang membahas tentang pembentukan memori kolektif dalam novel yang menggunakan teori memori kolektif Maurice Halbwachs.

Landasan Teori

Selain sebagai sosiolog, Maurice Halbwachs juga merupakan seorang filsuf. Konsep-konsep mendasar yang diajukan Emile Durkheim memiliki dampak yang signifikan terhadap ide-ide Halbwachs mengenai memori kolektif. Selain itu, ide-ide dari sejumlah pemikir lain, seperti Max Weber, Pareto, dan Joseph Schumpeter, juga berdampak pada Halbwachs. Ini adalah salah satu cara di mana Halbwachs memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran kontemporer Prancis. Sosiologi Emile Durkheim-lah yang menjadi sumber motivasi penting bagi Halbwachs dalam mempelajari sosialitas manusia. Dengan kata lain, ia menggabungkan pemikiran filosofis individualistik Bergson dengan teori sosial Emile Durkheim untuk membentuk dasar yang kuat bagi ide-idenya mengenai memori kolektif. Menurut sudut pandang ini, ingatan kolektif dipahami sebagai interaksi yang ada antara masa kini dan ingatan masa lalu. Sebuah rekonstruksi sosial dari masa lalu adalah apa yang dapat kita pahami sebagai ingatan kolektif ketika kita melihatnya dari sudut pandang masa kini. Dalam hal ini, penelitian sejarah dan ilmu-ilmu sosial

memainkan peran penting sebagai dasar analisis (Wattimena, 2016: 166).

Menurut pengandaian dasar pemikiran Halbwachs, memori selalu berakar pada pengalaman kolektif. Dengan kata lain, ingatan selalu merupakan produk dari sosialitas masyarakat individu. Memori dibentuk dan dipelihara oleh hubungan yang ada di antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ingatan manusia selalu merupakan ingatan kolektif. Seringkali individu hanya akan menganggap pikiran dan imajinasi manusia sebagai hal yang bersifat pribadi. Gagasan ini tidak dianut oleh Halbwachs. Segala hal yang muncul di dalam pikiran manusia selalu tertanam di dalam konteks sosial tertentu. Setiap inspirasi dan ide selalu diciptakan dari lingkungan sosial tertentu. "Diri" manusia juga merupakan sebuah produk sosial. Semua ini diciptakan oleh proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Wattimena, 2016: 167).

Halbwachs memandang memori kolektif sebagai sebuah konstruksi sosial. Menurut Halbwachs, sebuah proses ingatan dimulai dalam konteks sosial tertentu dan kemudian dimanifestasikan melalui simbol-simbol sosial yang menunjukan tentang pemahaman diri sebagai entitas sosial. Dalam hal ini, konstruksi sosial dibentuk oleh keprihatinan dan kebutuhan masa kini. Memori kolektif tidak mungkin berfungsi sebagai pendorong yang berbeda untuk periode sejarah yang saat ini berlaku jika orang memiliki persepsi bahwa masa lalu benar-benar asing. Sebuah ingatan hanya dianggap lengkap ketika ia dimunculkan dalam kaitannya dengan orang lain dalam sebuah konteks. Hal ini dikarenakan ingatan individu bersifat terpisah-pisah, yang berarti bahwa proses mengingat adalah sebuah tindakan sosial. Konsep ingatan kolektif sebagai konstruksi sosial merupakan konsep yang penting karena memberikan ruang bagi dampak-dampak sosial yang dimiliki oleh masyarakat di masa lalu terhadap masyarakat di masa kini. Konsep Halbwachs ini diperkuat dengan keyakinannya bahwa kebutuhan sosial masa kini menjadi pendorong terbentuknya ingatan kolektif, yang memproses masa lalu sebagai simbol untuk kepentingan masa kini (Alam, 2018: 19-21).

Selanjutnya, Wertsch dan Roediger (2008) menambahkan tiga oposisi yang menggambarkan bidang konseptual terkait memori kolektif dan bagaimana kemudian memori kolektif diterapkan pada beberapa masalah yang berkaitan dengan peran bahasa dalam mengingat.

Pertama, memori kolektif versus ingatan kolektif (*collective remembering*), memori kolektif merujuk pada ingatan yang dimiliki bersama atau oleh sekelompok orang. Hal ini mencakup narasi, simbol, dan tradisi yang menjadi bagian inti dari identitas kelompok tersebut. Memori kolektif sering kali dipertahankan melalui institusi sosial seperti sekolah, museum, dan media massa yang juga membantu dalam memelihara dan menyebarluaskan ingatan-ingatan tersebut. Berdasarkan budaya dan identitas, memori kolektif membentuk identitas kelompok dengan menyediakan narasi bersama yang memperkuat nilai-nilai dan norma-norma budaya. *The sites of the contestation over collective remembering include family discussions, museums, monuments and memorials, history textbooks, and national holidays* (Reese & Fivush, 2008). Sedangkan ingatan kolektif lebih menekankan pada aktivitas dan proses interaktif yang di mana sekelompok individu secara aktif terlibat dalam membentuk dan mengingat kembali masa lalu seperti dalam mengingat melalui interaksi sosial, diskusi dan komunikasi antar anggota kelompok. Proses ini bersifat dinamis dan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasional saat ingatan tersebut direkonstruksi.

Kedua, sejarah versus ingatan kolektif, *For its part, history aspires to provide an accurate account of the past, even if it means we must give up favoured and often self-serving narratives. In contrast, collective remembering inevitably involves some identity project remembering in the service of constructing what kind of people we are and hence is resistant to change even in the face of*

contradictory evidence (Wertsch & Roediger, 2008). Sejarah mengacu pada rekonstruksi masa lalu berdasarkan bukti empiris dan ilmiah yang dapat diverifikasi. Sejarah disampaikan melalui narasi yang formal dan terstruktur yang juga sering diajarkan di sekolah dan didukung oleh institusi seperti museum. Sementara ingatan kolektif menyoroti cara kelompok sosial membentuk identitas melalui narasi yang dibangun bersama, yang bisa berbeda dengan catatan sejarah yang objektif.

Ketiga, ingatan individu versus ingatan kolektif, ingatan individu mengacu pada proses di mana seorang mengingat kembali peristiwa, fakta atau informasi dari masa lalu secara pribadi. Ingatan ini bersifat subjektif yang sangat dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman pribadi, hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam mengingat suatu peristiwa yang sama. Sedangkan perbedaan yang paling terlihat antara ingatan individu dan ingatan kolektif yaitu pada proses mengingat. Ingatan kolektif merujuk pada cara sekelompok orang, seperti komunitas atau bangsa secara bersama-sama mengingat dan memaknai peristiwa masa lalu. Proses ini melibatkan interaksi dan komunikasi di antaranya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur dapat mencerminkan dan membentuk memori kolektif suatu kelompok sosial, dalam hal ini masyarakat Aceh. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996: 73).

Objek penelitian ini terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang akan diteliti dalam lapangan penelitian, dan objek formal merupakan objek yang meneropong dalam perspektif tertentu (Faruk, 2012). Objek material yang digunakan dalam penelitian adalah novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur yang pertama kali terbit pada tahun 2020 yang juga mendapatkan juara kedua dalam Sayembara Novel Basabasi 2019. Sedangkan, objek formal yang digunakan adalah teori memori kolektif Maurice Halbwachs.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka (*library research*), simak, dan catat. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, (1) membaca novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* secara berulang; (2) mencari kata, frasa, kalimat, paragraf atau wacana sebagai data yang mengandung memori kolektif peristiwa pemberontakan di Aceh; (3) menyalin data yang ditemukan pada tabel pengumpulan data.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek naratif yang berkaitan dengan memori kolektif. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisis secara langsung terhadap narasi yang merepresentasikan memori kolektif yang digunakan pengarang dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* melalui proses (1) reduksi data memilih data yang akan dianalisis berupa kata, kalimat, atau narasi yang mengandung memori kolektif; (2) penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah dipilih dan dianalisis; (3) verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil analisis memori kolektif dalam novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* menarasikan keadaan masyarakat Kampung Kareung, Kabupaten Pidie yang menjadi korban konflik antara pemberontak dan pemerintah pusat. Para serdadu menyiksa siapa saja yang dianggap sebagai pemberontak. Tidak hanya menyiksa bahkan mereka juga membunuh, memperkosa, hingga membakar rumah-rumah warga sipil yang tidak bersalah. Tak kunjung usai pemerintah menyelesaikan konflik tersebut, justru terus semakin bergejolak. Hingga setelah bencana tsunami 2004 konflik tersebut menjadi sorotan dunia

yang memaksa untuk berdamai. Setelah berdamai pemerintah meminta maaf dan berjanji untuk memberikan rumah kepada para warga khususnya korban dan pejuang. Namun, banyak warga yang tidak mendapatkan keadilan terutama Kawi salah satu pejuang sekaligus tokoh sentral yang tidak mendapatkan keadilan tersebut.

Pada novel tersebut pemberontak direpresentasikan sebagai anggota GAM yang melakukan pemberontakan di Aceh terhadap pemerintah pusat. Setelah pemberontakan Darul Islam, kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat kembali direfleksikan dalam pemberontakan GAM yang diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro (Syamsuddin, 1989: 70). Selama masa Orde Baru, pemerintah tidak memberi angin segar kepada gembong GAM. GAM bentukan dan pimpinan Hasan Tiro sejak awal sudah dinyatakan memiliki dukungan dana dari luar negeri, serta pelatihan gerilya militer di Libya. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa pemberontakan DI/TII, yang dipimpin oleh Daud Beureuh, semata-mata merupakan pemberontakan yang ditujukan kepada pemerintah pusat Indonesia, yang tampaknya dipengaruhi oleh komunisme. Sedangkan yang diinginkan Hasan Tiro adalah kemerdekaan dari Aceh-Sumatera, yaitu sebagai negara dan bangsa yang berdaulat di atas tanah Sumatera (Al-Chaidar, 1998: 64-65).

> Waktu itu pertengahan tahun 1990, sejumlah tentara sengaja dikirimkan Pemerintah Jakarta untuk memberangus para pejuang kemerdekaan yang berkeliaran di sejumlah wilayah Aceh; Suman, lelaki tiga puluhan, adalah salah seorang dari mereka. Sekawanan serdadu itu mengendus jejak kaki Suman yang pernah menikam mati seorang prajurit di keramaian Pasar Kota Lamlhok (*KMNA*/AN/2020: 14).

Serdadu menggeledah dan mengobrak-abrik sejumlah rumah penduduk untuk mencari jejak pemberontak dengan mencari barang-barang seperti bendera, senjata dan benda-benda lain yang berkaitan dengan pemberontakan. Bahkan bila serdadu menemukan salah satu penduduk yang memiliki selembar uang ringgit Malaysia, penduduk tersebut bisa kehilangan nyawanya karena dianggap sebagai pemberontak yang pernah bersembunyi di negeri tetangga. Keadaan yang sebelumnya damai tanpa pernah terjadinya keributan seketika menjadi mencekam.

Berdasarkan kutipan di atas, pengarang menginterpretasikan sejarah terjadinya peristiwa operasi militer melalui latar waktu yaitu yang berlangsung pada tahun 1989-1998. Pendekatan militer ini yang kemudian terkenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM). Pemerintah menganggap bahwa tidak mungkin melakukan pendekatan integrasi pada saat itu, sehingga tidak ada toleransi bagi para pemberontak (Nurhasim, 2008: 9). Pemberlakuan DOM di Aceh yang dilakukan dengan dalih pemulihan keamanan dari sisa-sisa GPK melalui tindakan represif militer di Aceh, ternyata membawa dampak yang sangat negatif, dan masyarakat Aceh diharuskan untuk menanggung peristiwa yang sangat mencekam tersebut. (Al-Chaidar, 1998: 39).

> "Mereka ingin kita mati semua, biar tak ada lagi yang menghalangi mereka untuk menjarah semua kekayaan bumi kita. Lihatlah dirimu, lihatlah orang-orang, betapa miskin dan sengsaranya. Padahal, apa kurangnya bumi mulia ini. Tanahnya subur, tumbuhan-tumbuhan hijau, ada kilang minyak, kilang gas, dan kilang kertas, kemana semua hasilnya?" (*KMNA*/AN/2020: 89).

Kutipan di atas merupakan dialog dari Suman (salah satu pimpinan pemberontak) dengan Kawi. Sedangkan Kawi adalah pemuda biasa Kampung Kareung yang terlahir dengan

kaki cacat di sebelah kanannya. Walaupun memiliki cacat pada tubuhnya, ia besar sebagai pemuda yang kuat karena sedari kecil Kawi sudah biasa mendapatkan tekanan dalam hidupnya. Dialog tersebut bermaksud untuk menyadarkan masyarakat agar tidak diam ketika hak-hak dan martabatnya dilecehkan.

Paparan di atas merepresentasikan bahwa pemberontakan dilakukan untuk mengakhiri eksploitasi dan ketidakadilan, serta mempertahankan identitas dan hak mereka. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama Orde Baru menekankan pada pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Selama proses pembangunan, sumber daya alam Aceh dimanfaatkan oleh pemerintah. Pembangunan kilang gas alam yang dimulai pada tahun 1971, dilakukan setelah ditemukannya sumber gas alam cair di desa Arun pada tahun 1969. Kilang Pupuk Iskandar Muda dan kilang gas (LNG) yang dibangun mengalami kemajuan pesat di bidangnya masing-masing. Sebagai hasil dari pendapatan ini, Indonesia menjadi salah satu eksportir LNG terbesar, dan sembilan puluh persen dari produksi pupuk ditujukan untuk diekspor (Al-Chaidar, 1998: 10).

Masyarakat Aceh tidak hanya merasakan adanya keseimbangan kekuasaan yang tidak adil antara pemerintah pusat dan daerah, namun mereka juga merasakan adanya ketimpangan sosial-ekonomi antara kelompok pendatang yang mengeksploitasi sumber daya alam Aceh dan masyarakat Aceh sendiri. Mayoritas masyarakat Aceh, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, masih tetap miskin. Banyak orang yang menyadari bahwa ekstraksi gas dan minyak memiliki potensi untuk membawa kemakmuran, namun sumber daya tersebut tidak pernah dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh (Hadi, 2007: 50).

> Serdadu-serdadu itu tidak segan-segan memukuli dan menembak siapa saja orang yang tidak mereka sukai; tidak peduli apakah orang itu petani apalagi pemberontak (*KMNA*/AN/2020: 119).

Kutipan tersebut merupakan representasi dari kebrutalan yang ditunjukkan oleh militer terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil di Aceh sebagai akibat dari operasi militer yang dilakukan dengan dalih untuk mengakhiri konsep Aceh Merdeka. Kekerasan yang terjadi di barak-barak militer sejak DOM diberlakukan, terutama di daerah-daerah utama pergolakan, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, telah membuat rakyat Aceh menderita (Usman, 2010: 212).

Selama periode DOM yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 1998, masyarakat sipil di Aceh menjadi sasaran berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini termasuk pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, perempuan juga mengalami pelecehan seksual berupa penelanjangan dan pemerkosaan. Keberadaan desa-desa janda di Aceh merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah orang yang hilang dan terbunuh akibat operasi militer di Aceh. Kampung janda muncul sebagai akibat dari banyaknya laki-laki yang diculik oleh pasukan keamanan dan tidak kembali (Herbani, 2014: 84-85). Situasi ini semakin diperkuat dengan kesaksian penduduk desa yang mengubur mayat-mayat yang mereka temukan di sungai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembunuhan terjadi hampir setiap hari dan tersebar di beberapa daerah yang berbeda. Beberapa orang dieksekusi di depan umum, sementara yang lain dibunuh secara tertutup. Tak jarang mereka menemukan mayat yang dipotong-potong, dibusukkan, dan dibiarkan tergeletak di tempat umum, hal ini bertujuan sebagai peringatan atau sumber teror bagi masyarakat Aceh lain (Afadlal, dkk, 2008: 264).

Pola kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia sangat tidak manusiawi. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap

norma-norma dan peraturan yang berlaku. Rakyat selalu menjadi sasaran tuduhan yang bersifat subversif tanpa pertimbangan apapun sebagai pelaku pemberontakan. Tuduhan-tuduhan subversif sebagai pelaku pemberontakan ditujukan kepada rakyat dengan membabi buta dan sesuka hati mereka. Hal ini dikarenakan aparat tidak mampu dalam membedakan antara rakyat biasa dengan anggota GAM yang juga disebut dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang yang dituduh membantu aktivitas anggota GAM ataupun memiliki senjata ilegal, dan tanpa ada bukti yang konkret terhadap tuduhan tersebut (Usman, 2010: 212).

> Segerombolan serdadu yang mengintai Suman, mengubrak-abrik rumah Syakhban dan rumah Kawi, diketahui paginya telah memperkosa Baidah. Gadis itu diperkosa ramai-ramai setelah lebih dulu mengubrak-abrik isi rumahnya (*KMNA*/AN/2020: 107).

Gadis tersebut adalah Baidah, wanita yang disukai Kawi. Setelah mengetahui wanita yang disukainya diperkosa oleh serdadu, Kawi sangat marah, ia membayangkan menjadi seorang yang kebal senjata dan menebas semua serdadu dengan parang. Namun, kenyataannya dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Beberapa orang yang ingin membalaskan dendamnya kepada serdadu, akhirnya hanya mati konyol di tangan serdadu yang langsung menembaknya.

Kutipan di atas menggambarkan bahwa di Aceh, tidak hanya kejahatan yang dilakukan terhadap laki-laki, tetapi juga tentara melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Aceh. Beberapa peristiwa penyiksaan tragis yang dilakukan oleh aparat militer terhadap perempuan di Aceh, misalnya, diperkosa bergilir, dicambuk dengan kabel, ada yang diperkosa di depan anak-anaknya, dan ada pula istrinya yang ditelanjangi dan diperkosa sementara suami dipaksa keluar rumah. Selain itu, ada yang ditelanjangi dan diarak sambil disiksa di tengah keramaian pasar, lalu ditembak di depan banyak orang. Yang ironisnya lagi ada juga wanita yang diperkosa secara bergilir dan dimasukkan botol minuman ke dalam kemaluannya. Itulah antara lain berbagai cara penyiksaan yang dilakukan militer terhadap perempuan Aceh (Al-Chaidar 1998: 87).

Pada tanggal 7 Agustus 1998, Presiden Habibie mengakhiri status Aceh sebagai wilayah pemerintahan militer, dan pasukan militer secara terbuka ditarik dari wilayah yang dikuasai militer. Namun, yang lebih penting lagi adalah tindakan yang diambil Habibie untuk membebaskan pers, yang memungkinkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pers melaporkan operasi militer. Selama operasi militer yang dilakukan terhadap gerakan kemerdekaan, sejumlah besar organisasi non-pemerintah didirikan di Aceh dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban militer atas kekejaman yang dilakukan terhadap warga sipil. Sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada saat itu, Jenderal Wiranto mengakui dampak negatif dari DOM di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998. Permintaan maaf lebih lanjut dikeluarkan oleh Wiranto, dan berjanji untuk menghapuskan status DOM yang telah berlaku sejak tahun 1998 (Herbani, 2014: 75-76). Wiranto, sebagai pemimpin ABRI, mengambil keputusan untuk menyerahkan tanggung jawab keamanan Aceh sepenuhnya kepada rakyat Aceh. Ini termasuk para ulama, tokoh masyarakat, guru, pejabat pemerintah, dan semua anggota masyarakat, termasuk satuan-satuan ABRI di bawah Polda dan Korem-Korem di Aceh (Al-Chaidar, 1998: 69).

Tidak hanya sampai di situ, konflik di Aceh antara GAM dan pemerintah pusat belum juga meredam. Konflik di Aceh semakin bergejolak. Konflik yang tak kunjung usai tersebut merupakan hasil dari perbedaan perspektif yang mendasar tentang otoritas yang sah atas Aceh antara GAM dan pemerintah Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah

Aceh membutuhkan lebih dari sekedar melakukan dialog politik dengan pemerintah. Satu-satunya cara yang efektif untuk memadamkan pemberontakan di kalangan masyarakat Aceh adalah dengan melakukan operasi yang terkoordinasi. Lalu, diberlakukannya perjanjian dalam kesepakatan penghentian kekerasan *Cessation on Hostilities Agreement* (CoHA) yang ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Namun, lagi–lagi kedua belah pihak dihadang oleh jalan buntu. Selama pemerintah mengevaluasi tiga opsi kebijakan untuk Aceh, keluarlah Keputusan Presiden tahun 2003 untuk menerapkan status darurat militer di Aceh (Jayanti, 2013: 64).

> Sayang sekali, perang segera usai, tak berselang lama setelah bencana mengejutkan gelombang air laut raya di akhir tahun 2004 itu yang meluluhlantakkan daratan di Pantai Timur dan Pantai Barat Aceh. Bencana itu dengan sendirinya menghentikan peperangan yang sedang hebat-hebatnya berlangsung.
>
> Pemerintah dan pejuang pun sepakat berdamai. Jakarta berjanji memberikan hak-hak yang sepatutnya diterima rakyat Aceh, asalkan pejuang bersedia menyerahkan senjata dan Pemerintah Indonesia secara resmi meminta maaf karena telah membunuh begitu banyak orang Aceh dan memperkosa perempuan-perempuannya. Untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa tentara, mereka memberikan bantuan rumah dan menyantuni korban perang (*KMNA*/AN/2020: 135).

Pada tahun 2004, bencana tsunami melanda di tengah-tengah konflik yang tak kunjung usai di Aceh, dan menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Selama bencana tsunami, sebuah momentum baru tercipta untuk penyelesaian konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan GAM telah mencapai kesepakatan setelah bencana untuk tidak melanjutkan konflik di tengah penderitaan yang dialami masyarakat akibat bencana tsunami. Baik pemerintah pusat maupun GAM sampai pada kesimpulan bahwa melanjutkan konflik dan menggunakan kekerasan dengan strategi militer akan sama-sama merugikan kedua belah pihak yang terlibat (Mudjiharto, 2020: 92).

Pada masa pemerintahan SBY, pemerintah dan GAM mulai menemukan titik terang dalam hubungan mereka. Kedua belah pihak kembali berpartisipasi dalam perundingan damai di Aceh. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap percepatan perdamaian di Aceh adalah pelaksanaan perundingan damai. Presiden SBY menetapkan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah melalui jalan damai (Nurhasim, 2008: 64). GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani MoU Helsinki di Finlandia, yang menandai puncak perundingan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM setelah bencana tsunami. Perundingan ini berlangsung selama lima putaran, dimulai pada bulan Januari 2005 dan berakhir pada bulan Agustus 2005 (Jayanti, 2013: 66-67).

Halbwachs menganggap bahwa memori kolektif sebagai hasil dari interaksi sosial di antara individu-individu dalam kelompok. *It is, of course, individuals who remember, not groups or institutions, but these individuals, being located in a specific group context, draw on that context to remember or recreate the past* (Halbwachs, 1992: 22). Menurutnya, ingatan kolektif tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi individu saja, tetapi juga diperkuat oleh makna dari nilai-nilai dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Penggambaran karakter tokoh, lokasi, waktu dalam novel yang mengalami peristiwa secara langsung dalam konteks masyarakat Aceh pada masa konflik, mengacu pada representasi individu yang tidak hanya

mengalami peristiwa konflik secara pribadi, tetapi juga sebagai simbol-simbol dari ingatan kolektif yang lebih luas. Misalnya, Kawi sebagai tokoh sentral dalam novel tersebut, bisa menjadi realitas dari korban atau saksi langsung konflik bersenjata yang mengguncang masyarakat Aceh. Pengarang tidak hanya menggambarkan pengalaman individu, tetapi juga menyelipkan pengertian tentang bagaimana pengalaman tersebut tercermin dalam novel. Dengan kata lain, pengalaman-pengalaman karakter tokoh dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* bukan hanya milik pengarang sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari catatan sejarah dan identitas bersama masyarakat Aceh yang mengalami langsung dalam peristiwa tersebut.

Selanjutnya, Halbwachs menekankan bahwa struktur sosial, seperti keluarga, komunitas, dan institusi lokal, memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharan memori kolektif. *When it comes to historical memory, the person does not remember events directly; it can only be stimulated in indirect ways through reading or listening or in commemoration and festive occasions when people gather together to remember in common the deeds and accomplishments of ling-departed members of the group*. Dalam hal ini, masa lalu disimpan dan ditafsirkan oleh lembaga-lembaga sosial (Halbwachs, 1992: 28).

Pengaruh lingkungan sosial dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* mengacu pada cara norma-norma sosial dan dukungan dari keluarga serta lembaga atau komunitas lokal yang membentuk cara masyarakat Aceh mengingat dan merespons peristiwa-peristiwa pada masa konflik. Pengarang mungkin mengeksplorasi bagaimana keluarga-keluarga yang terpengaruh oleh konflik memberikan dukungan emosional dan praktis terkait mereka yang mengalami secara langsung pada masa konflik. Keikutsertaan komunitas lokal juga dapat dipresentasikan sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan bersama dan membangun kembali hubungan sosial pasca-konflik. Dengan demikian, lingkungan sosial bukan hanya sebagai latar belakang saja, tetapi juga merupakan peran yang aktif dalam membentuk dan mendukung memori kolektif.

Lebih jauh lagi, Halbwachs juga menyoroti bahwa memori kolektif itu tidak bersifat statis yaitu bersifat dinamis; ia terus berubah seiring berjalannya waktu. *For Halbwachs, the past is a social construction mainly, if not wholly, shaped by the concerns of the present.* Pendekatan presentis inilah, yang disebut sebagai pendekatan masa kini, yang digunakan Halbwachs dalam *The Legendary topography of the Gospels in the Holy Land*, seperti yang ia lakukan dalam beberapa karya lainnya. Ia berpendapat bahwa kepercayaan, kepentingan, dan aspirasi masa kini membentuk berbagai pandangan masa lalu yang diuji secara manifes di setiap zaman sejarah (Halbwachs, 1992: 25).

Reinterpretasi sejarah dalam konteks novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* mencerminkan proses di mana pengarang merenungkan kembali pengalaman masa lalu masyarakat Aceh dari perspektif yang berubah seiring waktu di dalam novel. Pengarang menunjukan bagaimana interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, yaitu seperti konflik bersenjata dan pelanggaran HAM. peristiwa-peristiwa tersebut dapat berkembang dan berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan politik, sosial, dan budaya yang melintasi rentang waktu. Dengan demikian, novel dapat berfungsi sebagai cermin bagi transformasi memori kolektif dalam bentuk naratif, serta menunjukan bagaimana interpretasi tentang sejarah dapat direvisi dan disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan dan konteks masyarakat yang berubah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur mengandung ingatan kolektif

tentang peristiwa konflik antara GAM dan pemerintah pusat serta keterpurukan masyarakat Aceh yang menjadi korban konflik tersebut. Proses pembentukan memori kolektif terdiri dari 3 hal yaitu, (1) penggambaran karakter, lokasi, dan waktu mengacu pada representasi individu yang tidak hanya mengalami peristiwa secara pribadi, tetapi juga sebagai simbol-simbol dari ingatan kolektif yang lebih luas, (2) pengaruh lingkungan sosial dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* mengacu pada cara norma-norma sosial dan dukungan dari keluarga serta lembaga atau komunitas lokal yang membentuk cara masyarakat Aceh mengingat dan merespons peristiwa-peristiwa pada masa konflik, dan (3) reinterpretasi sejarah dalam konteks novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* mencerminkan proses di mana pembaca merenungkan kembali pengalaman masa lalu mereka dari perspektif yang berubah seiring waktu.

Berdasarkan temuan, dapat dipahami bahwa karya sastra khususnya novel merupakan salah satu media yang dapat merefleksikan dan memelihara memori kolektif secara kompleks. Novel tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas dan memori kolektif sebuah kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Chaidar. (1998). *Aceh Bersimbah Darah: Pengungkapan Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Halbwachs, Maurice. (1950). *On Collective Memory*. Terjemahan oleh Lewis A. Coser 1992. London: University of Chicago Press.

Herbani, A. (2014). *Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998).* Universitas Negeri Yogyakarta.

James V. Wertsch & Hendy L. Roediger III (2008). Collective Memory: Conceptual Foundation and Theoretical Approaches. *Memory, 16:* 3, 318.

Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005. *Al-Turas XIX*(1).

Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mudjiharto. (2020). Perdamaian Aceh Pasca Bencana Tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki: Telaah Kritis Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Aceh.. *Jurnal Politik Profetik, 8*(1).

Nur, A. (2020). *Kawi Matin di Negeri Anjing.* Yogyakarta: Basabasi.

Pangestu M. A. (2021). Memori Kolektif dalam Novel Secangkir Teh Melati Karya Bunjamin Wibisono. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra, 10*(2).

Usman, A. R. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wattimena, Reza A. A. (2016). Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs, Jan Assman dan Aleida Assman dalam Konteks Peristiwa 65 di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica, 16*(2).